

KOALISI PARTAI ISLAM DI INDONESIA PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

ISLAMIC POLITICAL PARTY COALITION IN THE 2014 PRESIDENTIAL ELECTION

Esty Ekawati

Peneliti Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10, Jakarta
E-mail: estylwati@gmail.com

Diterima: 17 Februari 2015; direvisi: 25 Mei 2015; disetujui: 23 Juni 2015

Abstract

Political coalition is a necessity for a state, like Indonesia, that using multiparty system. Coalition is a must since the election could not provide a majority in a parliament. Some factors have determined the parties' political behavior in Indonesia and present two factors that would determine why were the coalition of Islamic political parties difficult to realize in the 2014 Presidential election. Firstly, political pragmatism has made Islamic political party become cartel party in which party become agent of the state and employs the resources of the state to ensure the survival of the party. Secondly, Islamic political parties do not have popular figures against Prabowo and Jokowi.

Keywords: *political party, general election, coalition.*

Abstrak

Koalisi politik merupakan suatu keniscayaan bagi negara yang menggunakan sistem multipartai seperti Indonesia. Koalisi menjadi keharusan karena pemilihan umum tidak mampu menghasilkan suara mayoritas di parlemen. Beberapa faktor menentukan bagaimana sebuah koalisi bisa terbentuk dan dalam konteks ini ada faktor-faktor yang menentukan mengapa koalisi partai Islam sulit terwujud pada pemilihan presiden 2014. Faktor pertama yang memengaruhi yaitu pragmatisme politik yang membuat partai politik menjadi partai kartel dimana dalam hal ini partai menjadi agen negara dan memanfaatkan sumber daya negara untuk kelangsungan hidup partai. Faktor yang kedua adalah partai-partai Islam tidak memiliki figur populer yang mampu menyaingi popularitas Prabowo dan Jokowi.

Kata Kunci: partai politik, pemilu, koalisi.

Pendahuluan

Perkembangan kehidupan masyarakat dunia telah menuntut adanya keterbukaan dan partisipasi publik, baik dalam aspek sosial maupun politik tak terkecuali di Indonesia. Jika kita menengok kembali pemerintahan Orde Baru yang sentralistik, maka masyarakat dihadapkan

pada kondisi pengekan terhadap partisipasi politik, tidak terkecuali posisi organisasi Islam.

Di Indonesia, hubungan antara Islam dan politik pada era Presiden Soekarno dan Soeharto seolah mengalami jalan buntu. Kedua pemerintahan ini memandang partai-partai politik yang berlandaskan Islam sebagai pesaing

kekuasaan yang potensial yang dapat merobohkan landasan negara yang nasionalis.¹ Selama pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru, ada upaya untuk melemahkan dan “menjinakkan” partai-partai Islam. Akibatnya, para pemimpin maupun aktivis Islam politik gagal menjadikan Islam sebagai ideologi dan agama negara di tahun 1945, bahkan Islam politik seringkali menjadi sasaran ketidakpercayaan dan dicurigai menentang ideologi Pancasila.² Kondisi tersebut menjadikan partai politik Islam bertarung keras dengan partai-partai nasionalis dalam mempertahankan posisi bahkan asas Islamnya.

Marjinalisasi kekuatan kelompok agama oleh pemerintah mencapai puncak pada masa Orde Baru yang dimulai tahun 1966, ketika Soeharto menolak keinginan tokoh-tokoh Partai Masyumi untuk menghidupkan kembali partai tersebut.³ Pada tahun 1968, sebuah partai penerus Masyumi disetujui dengan nama baru, Partai Muslimin Indonesia (Pamusi), akan tetapi tetap tidak disetujui untuk mengikutsertakan para pemimpin Masyumi lama yang dianggap pemerintah masih keras pendiriannya.⁴ Hal ini bisa dilihat bagaimana elit-elit Partai Masyumi tahun 1950-an yang cenderung bersikap kritis terhadap pemerintah.

Sebelum Pemilu tahun 1971, Presiden Soeharto melontarkan gagasan perlunya penyederhanaan partai. Sembilan partai politik dan satu golongan karya yang ada akan dikelompokkan, yang tujuannya adalah untuk mempermudah kampanye pemilihan umum, bukan untuk melenyapkan partai.⁵ Kebijakan yang mempengaruhi perkembangan partai politik selanjutnya terjadi pada tahun 1973, yang mana Orde Baru melakukan fusi atau

penggabungan partai politik kedalam dua partai dan satu Golongan Karya. Kedua partai tersebut yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terdiri dari NU, Parmusi, PSII, dan Perti; dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan dari PNI, IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia), Parkindo (Partai Kristen Indonesia), Partai Katolik, dan Partai Murba.⁶ Pada tahun 1983, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bentukan Orde Baru menetapkan Pancasila sebagai asas tunggal sehingga semua partai politik dan organisasi massa harus berasaskan Pancasila.

Pengunduran diri Presiden Soeharto pada Mei 1998 merupakan keruntuhan rezim otoritarianisme Orde Baru yang berkuasa lebih dari tiga puluh tahun lamanya. Terkungkungnya kehidupan masyarakat Indonesia selama pemerintahan Soeharto dalam hal politik terutama, telah menimbulkan suatu semangat untuk menciptakan negara yang lebih demokratis yang menghargai hak-hak politik dan partisipasi publik. Reformasi merupakan era dimana demokrasi mulai dikembangkan di Indonesia demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Pembangunan sistem demokrasi di Indonesia seperti yang kita alami pascareformasi diawali dengan penyusunan Undang-Undang paket politik yang di dalamnya mengatur tentang kebebasan masyarakat dalam membentuk partai politik.

Euforia politik dapat dilihat menjelang Pemilu 1999 dimana terjadi ledakan partisipasi politik masyarakat melalui pembentukan partai politik terutama yang berlabel Islam. Dalam minggu kedua Desember 1998 setidaknya ada 123 partai politik yang terbentuk, dan ada 20 partai politik berlabel Islam dan ada sekitar 30

¹ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Paramadina, 1998), hlm. 2.

² *Ibid.*, hlm. 3.

³ Muhammad Sirozi, *Catatan Kritis Politik Islam Era Reformasi*, (Yogyakarta: AK Group, 2004), hlm. 24.

⁴ Pramono U. Tanthowi, *Kebangkitan Politik Kaum Santri: Islam dan Demokratisasi di Indonesia, 1990-2000*, (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2005), hlm. 50.

⁵ Pernyataan Daniel Dhakidae dalam Redaksi, “Nahdlatul Ulama Menjadi Partai Politik”, 23 Juni 2013, <http://alfathimiyah.net/?p=3666/23/06/2013>, diakses pada tanggal 31 Januari 2015.

⁶ Golongan Karya telah terbentuk sejak 1957 bagi banyak orang yang tidak menyukai ideologi partai yang terkotak-kotak dan saling berperang. “Jika Partai dimulai dari ideologi, maka golongan karya dimulai dari pekerjaan mereka”. Golongan Karya ini terdiri dari berbagai organisasi yang hingga tahun 1967 jumlah anggotanya mencapai 262 organisasi. Dalam tahap pertama organisasi ini, 1957-1965, organisasi-organisasi Golkar berubah dari melawan semua partai menjadi rival politik bagi PKI. Pada tahap kedua, 1968-1998, organisasi Golkar digunakan untuk menjadi kendaraan elektoral bagi militer dan Orde Baru. Pada tahap ketiga, 1998 hingga sekarang, Golkar berubah menjadi partai dan diambil alih oleh para pengusaha. Lihat, David Reeve, *Golkar Sejarah Yang Hilang: Akar Pemikiran dan Dinamika*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2013), hlm. xiii dan 293-296.

partai politik yang dengan tegas menjadikan komunitas Muslim sebagai basis atau target massa mereka.⁷ Meskipun akhirnya hanya 48 partai politik yang bisa ikut dalam Pemilu 1999.

Beberapa partai politik Islam pada pemilu 1999 memperoleh persentase suara akumulatif sekitar 32%. Untuk menghadang kekuatan Megawati dan BJ Habibie, maka Partai-Partai Islam tersebut melakukan koalisi yang kemudian dikenal dengan Poros Tengah. Koalisi ini mengajukan KH Abdurrahman Wahid sebagai calon Presiden dan berdasarkan hasil dari Sidang Istimewa MPR 1999 diputuskan bahwa KH Abdurrahman Wahid sebagai Presiden. Adapun proses pemilihan wakil presiden yang dilakukan terpisah memutuskan Megawati Soekarno Putri sebagai wakil Presiden.

Pada pemilu Presiden 2004 dan 2009, partai-partai Islam cenderung lebih memilih berkoalisi dengan partai pemerintah. Adapun pada Pilpres 2014 dimana konfigurasi hasil pemilu legislatif mengalami perubahan sebagai dampak dari munculnya fenomena figur yang cukup kuat yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto membawa perubahan perilaku koalisi politik Partai Islam seperti PKB, PKS, PAN dan PPP. Berdasarkan hasil perolehan suara pada pemilihan legislatif 2014, partai-partai Islam memperoleh suara yang cukup signifikan. Hal itulah yang kemudian memunculkan wacana untuk mempersatukan partai-partai Islam dalam sebuah koalisi atau Poros Tengah Jilid II. Upaya tersebut sempat ditindaklanjuti dengan pertemuan antar elite partai-partai Islam. Namun pada akhirnya, masing-masing parpol memiliki perilaku politik yang berbeda dalam menentukan rekan koalisinya.

Sistem kepartaian di Indonesia era reformasi tergolong pada sistem pluralitas ekstrim dimana jumlah partainya sangat banyak dan memiliki rentang ideologi formal yang tajam serta cenderung bergerak secara sentrifugal yang berpotensi melahirkan perpecahan menjadi partai-partai baru.⁸ Untuk situasi politik

multipartai, koalisi politik merupakan keharusan bagi parpol manapun karena: 1) Tidak ada kekuatan politik yang memperoleh suara mutlak bila dibandingkan dengan gabungan partai-partai lain, 2) Koalisi politik menekankan adanya satu persamaan tujuan atau persepsi, juga kedekatan ideologis, 3) Pemilu multipartai mengisyaratkan adanya pola politik posisi kontra oposisi sehingga koalisi politik tidak bisa dihindarkan.⁹

Pembahasan mengenai koalisi partai Islam pada pemilu presiden belum ada di Indonesia. Kajian koalisi lebih banyak fokus pada pembentukan koalisi parpol pada pemilihan Kepala Daerah. Salah satunya adalah penelitian Sri Budi Eko Wardani yang membahas mengenai Koalisi Parpol pada Pilkada Provinsi Banten tahun 2006.¹⁰ Tulisan ini berbeda dengan kajian koalisi parpol dalam Pilkada. Tulisan ini akan difokuskan pada koalisi partai Islam pada pemilu presiden.

Jika membandingkan Pemilu 1999 dan 2014 maka dapat dilihat fenomena koalisi partai Islam yang terjadi. Pada Pemilu 1999, partai-partai Islam berhasil membangun koalisi yang dikenal dengan Poros Tengah dan mengusung Kyai Abdurrahman Wahid sebagai Calon Presiden. Sedangkan pada Pilpres 2014 koalisi Partai Islam tidaklah terbangun. Koalisi partai Islam pada Pilpres 2014 hanya sekedar wacana di awal karena pada akhirnya, masing-masing parpol Islam lebih memilih melakukan komunikasi politik/penjajakan koalisi secara sendiri-sendiri dengan partai politik lainnya. Disini penulis ingin mengkaji persoalan mengapa koalisi partai Islam sulit untuk diwujudkan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014.

Kerangka Pemikiran

Koalisi merupakan aktivitas politik yang kerap terjadi di negara dengan sistem multipartai, tak terkecuali di Indonesia pascaOrde Baru. Tulisan ini memahami perilaku koalisi partai politik sebagai bagian dalam membangun

⁷ Eep Saefullah Fattah, *Zaman Kesempatan: Agenda Besar Demokratisasi Pasca Orde Baru*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 255.

⁸ Hanta Yuda, *Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 34.

⁹ Deliar Noer *et.al*, *Mengapa Partai Islam Kalah, Perjalanan Politik Islam dari Pra-Pemilu 1999 sampai Pemilihan Presiden*, (Jakarta: ALVABET, 1999), hlm. 303.

¹⁰ Sri Budi Eko Wardani, *Koalisi Parpol dalam Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung Kasus Pilkada Provinsi Banten tahun 2006*, (Jakarta: Tesis UI, 2007).

pemerintahan yang didasarkan pada motif-motif tertentu. Seperti yang diungkapkan para ahli bahwa partai politik merupakan wadah bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam politik jika rakyat ingin menjadi anggota legislatif maupun jabatan-jabatan politik lainnya. Neumann mendefinisikan partai politik sebagai organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya untuk menguasai kekuasaan pemerintah dan bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan berbeda.¹¹ Sedangkan menurut Giovanni Sartori, partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum tersebut partai politik dapat menempatkan calon-calonnya untuk mengisi jabatan-jabatan publik.¹²

Koalisi partai politik merupakan keniscayaan bagi negara dengan sistem multipartai, karena hasil pemilu kerap menunjukkan konfigurasi suara yang tidak mampu memenuhi suara mayoritas untuk bisa membentuk pemerintahan sendiri. Dampaknya perlu ada koalisi partai politik untuk membentuk pemerintahan dan juga koalisi di parlemen dalam hal pengambilan keputusan tertentu. Koalisi pemerintahan diperlukan selain untuk memenangkan pasangan capres dan cawapres tertentu juga untuk mengisi jabatan-jabatan kabinet.

Salah satu pelopor teori koalisi politik adalah William Riker yang menjelaskan tentang koalisi partai melalui teorinya *Minimal-Winning Coalitions* (MWC).¹³ Menurut Riker, pemerintahan seharusnya dibentuk dengan koalisi yang menjamin kemenangan minimum. Beberapa asumsi dasar dari MWC adalah sebagai berikut: 1) Partai politik berkepentingan untuk memaksimalkan kekuasaan mereka, baik dalam kabinet maupun parlemen, 2) Yang dimaksud dengan MWC adalah diperlukannya jumlah kursi tertentu untuk mencapai kemenangan

yang minimal (cukup 50%+1) di parlemen, 3) MWC cukup membutuhkan koalisi dua atau lebih partai yang dapat mengontrol kursi parlemen, tetapi minimal dalam arti mereka tidak memasukkan partai yang tidak perlu untuk mencapai kemenangan. Koalisi ini cukup menguasai mayoritas minimal kursi parlemen dengan mengeluarkan partai-partai yang memiliki kursi kecil. Adapun tujuan atau motif koalisi adalah bersifat *office-seeking* (memaksimalkan kekuasaan)¹⁴.

Abraham De Swaan mengajukan teori koalisi yang berorientasi pada kebijakan yang menekankan betapa pentingnya ideologi partai dalam pembentukan koalisi¹⁵. Mendapatkan kekuasaan di pemerintahan bukanlah tujuan akhir dari politisi partai, namun merupakan sarana untuk menjalankan program ideologis dan menerapkan kebijakan yang didasarkan pada ideologi. Sehingga ini memungkinkan bagi partai-partai yang memiliki ideologi kurang lebih sama untuk melakukan koalisi.¹⁶ Teori ini berbeda dengan Katz dan Mair yang menyatakan bahwa semua partai besar memiliki kepentingan yang sama, yakni memelihara kelangsungan hidup kolektif mereka. Dan inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan partai kartel dimana partai politik menjadi agen negara dan menggunakan sumber daya milik negara untuk memenuhi kepentingan kolektif partai¹⁷ dengan melepaskan berbagai perbedaan ideologis dan programatis mereka demi kepentingan tertentu.¹⁸ Teori-teori mengenai koalisi tersebut yang akan penulis gunakan untuk melihat kecenderungan partai-partai di Indonesia terutama partai Islam dalam melakukan koalisi.

Perkembangan politik di Indonesia semakin berwarna dengan hadirnya partai politik dengan

¹¹ Sigmund Neumann, "Modern Political Parties" dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 404.

¹² Giovanni Sartori, *Parties and Party Systems: a Framework for Analysis*, (UK: ECPR Press, 2005), hlm. 57.

¹³ Lihat Sri Budi Eko Wardani, *op.cit.*, hlm. 13.

¹⁴ Kaare Strom, "A Behavioral Theory of Competitive Political Parties", *American Journal of Political Science*, Vol. 34, 1990, hlm. 567.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Kuskridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2009), hlm. 26-27.

¹⁷ Lihat Richard S. Katz and Peter Mair, *Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party*, (London: Sage Publication, 1995), Vol. 1, No.1, hlm. 5-28, <http://ppq.sagepub.com/content/1/1/5>.

¹⁸ Kuskridho Ambardi, *op.cit.*, hlm. 19.

haluan Islam (selanjutnya akan disebut sebagai partai Islam). Berdasarkan definisi yang diajukan oleh sejumlah ahli, maka kecenderungan partai Islam di Indonesia dibagi kedalam beberapa tipe. *Pertama*, didasarkan pada orientasi pembentukan negara Islam. *Kedua*, menggunakan simbol-simbol Islam atau simbol-simbol yang dekat atau mengidentikan dengan Islam seperti bulan dan bintang, Ka'bah atau huruf Arab, meskipun fondasinya tidak didasarkan pada Islam tapi mengkombinasikan dengan paham "isme" seperti Nasionalisme (Pancasila) atau sosialisme sebagai ideologinya. *Ketiga*, partai dengan basis massa Islam, yang tidak menggunakan simbol Islam, mengkombinasikan Islam dengan ideologi lainnya sebagai fondasi atau orientasi politiknya dan tidak dapat dipisahkan dari komunitas Islam untuk bisa eksis di politik nasional terutama pada saat pemilihan umum. Tipe partai Islam yang kedua dan ketiga ini mengakomodasi nilai dan substansi Islam sebagai tujuannya, namun tidak memasukkan syariat Islam dalam konstitusi.¹⁹ Definisi yang kedua dan ketiga yang dijadikan dasar penulis dalam mengelompokkan partai-partai seperti PPP, PKB, PAN dan PKS sebagai partai Islam.

Kiprah Partai Islam di Indonesia

Reformasi 1998 menjadi salah satu momen penting dalam politik Indonesia karena telah membuka kesempatan bagi partisipasi politik rakyat dan juga kembalinya Islam sebagai kekuatan politik potensial. Perubahan iklim politik juga diikuti dengan bermunculannya organisasi-organisasi dan partai-partai politik yang dulu terkekang oleh kekuasaan Orde Baru, termasuk partai-partai Islam. Pemilu 1999 menjadi *starting point* bagi partai Islam untuk eksis di panggung politik nasional dimana PPP sebagai partai lama warisan Orde Baru harus berhadapan dengan beberapa partai Islam baru yang tidak kalah kuat dukungannya.

Konfigurasi suara partai Islam dan partai nasionalis-sekuler pada Pemilu 1999 hingga 2014 menyajikan drama politik yang terjadi

pada masa pemilihan calon Presiden dan wakil Presiden. Pada tahun 1999, di tengah kompetisi partai politik dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden muncul fenomena koalisi partai-partai Islam yang kemudian disebut Koalisi Poros Tengah. Pada saat itu, nama Amien Rais yang dikenal sebagai lokomotif reformasi begitu menguat untuk dicalonkan sebagai Presiden. Namun, kalkulasi politik Amien Rais yang tidak ingin maju dalam bursa capres justru memunculkan nama Abdurrahman Wahid (yang selanjutnya disebut Gus Dur) sebagai calon presiden untuk menghadang Megawati yang diusung oleh PDIP. Berdasarkan Sidang Istimewa MPR yang dilakukan secara tertutup, Abdurrahman Wahid memperoleh suara sebanyak 373, sedangkan Megawati Soekarnoputri mendapat dukungan 313 suara. Atas dasar perolehan suara tersebut maka diputuskan Gus Dur sebagai Presiden RI.

Sejarah 1999 juga memperlihatkan drama pemilihan calon wakil presiden. Ketika Koalisi Poros Tengah mengajukan Gus Dur sebagai calon presiden dan akhirnya terwujud, pemilihan wakil presiden dilaksanakan secara terpisah. Meskipun Poros Tengah didukung oleh partai Islam, namun kenyataan justru menunjukkan sebaliknya. Megawati yang notabene dari PDIP dan dikenal sebagai partai nasionalis-sekuler justru mampu mengalahkan Hamzah Haz (396 suara untuk Megawati dan 284 bagi Hamzah).²⁰

Kekalahan Hamzah Haz tentunya bukan tak beralasan. Sebenarnya, Poros Tengah dan Golkar bisa memaksakan calon wakil presidennya bukan Megawati, melainkan Hamzah Haz, atau Susilo Bambang Yudoyono dari ABRI yang saat itu mencoba bersaing dalam memperebutkan kursi wapres.²¹ Kemenangan Gus Dur atas Megawati menimbulkan kegaduhan politik saat itu. Hal tersebut disebabkan Megawati yang notabene berasal dari PDI-P sebagai partai pemenang Pemilu Legislatif 1999, justru kalah dalam pemungutan suara di SI MPR. Demonstrasi, kerusuhan dan pembakaran terjadi di beberapa

¹⁹ Firman Noor, *Institutionalising Islamic Political Parties in Indonesia: A Study of Internal Fragmentation and Cohesion in the Post-Soeharto Era (1998-2008)*, Dissertation, (UK: University of Exeter, 2012), hlm. 21.

²⁰ Abdul Bari Azed, "Pilpres di Era Transisi Tahun 1999", 14 Oktober 2014, <http://www.jambiexpresnews.com/berita-18609-pilpres-di-era-transisi-tahun-1999.html>, diakses pada tanggal 31 Januari 2015.

²¹ Saiful Mujani, William Liddle, dan Kuskritho Ambardhi, *Kuasa Rakyat*, (Jakarta: Mizan, 2011), hlm. 134.

daerah seperti di Bali, Jawa Tengah, Sumatera Utara dan Riau sebagai akibat dari kekecewaan dan kemarahan pendukung Megawati. Demi meredakan kemarahan pendukung PDIP maka Sidang Istimewa MPR dengan agenda pemilihan wakil presiden dilakukan secara tertutup. Hasil *voting* menunjukkan dukungan mayoritas anggota MPR-RI diberikan kepada Megawati.²²

Terpilihnya Gus Dur sebagai Presiden dan Megawati sebagai wakilnya adalah fakta bahwa demokrasi bukannya sistem yang sempurna untuk memilih pemimpin, namun cara yang paling mungkin untuk menengahi pertarungan dan konflik elit politik yang terjadi saat itu.²³

Terbentuknya koalisi Poros Tengah tidak lepas dari peran PAN dan Amien Rais dalam memberi dukungan kepada Gus Dur sebagai calon presiden. Namun dalam perjalanannya, dukungan PAN terhadap Gus Dur sebagaimana tertuang dalam rekomendasi politik yang disahkan dalam Kongres I PAN di Yogyakarta bulan Februari 2000 tidak bertahan lama. Pada temu nasional legislatif PAN, partai ini memutuskan mencabut dukungan kepada Gus Dur. PAN menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi bangsa dan negara yang terpuruk hampir di segala bidang.²⁴ Carut marut politik pasca Pemilu 1999 oleh sebagian kalangan dianggap tidak lepas dari tanggung jawab Amien Rais yang kerap bermanuver mulai dari penghadangan Megawati melalui Poros Tengah sampai pada pemakzulan Gus Dur melalui Sidang Istimewa MPR yang justru akhirnya digantikan oleh Megawati.²⁵

Amien Rais yang mendapat dukungan besar untuk menjadi Presiden tahun 1999 justru tidak berupaya memperebutkan kursi Presiden sehingga menjadikan Gus Dur sebagai kuda hitam penghadang Megawati. Kondisi

²² Abdul Bari Azed, "Pilpres di Era Transisi Tahun 1999", 14 Oktober 2014, <http://www.jambiexpres.co.id/berita-18609-pilpres-di-era-transisi-tahun-1999.html>, diakses pada tanggal 31 Januari 2015.

²³ Saiful Mujani, William Liddle, dan Kuskrindo Ambardi, *op.cit.*, hlm. 134.

²⁴ Tim Litbang Kompas, *Partai-partai Politik di Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004).

²⁵ Pusat Penelitian Politik Year Book 2004, *Quo Vadis Politik Indonesia*, (Jakarta: LIPI press, 2004), hlm. 32.

sebaliknya, saat Pilpres 2004 dimana perolehan suara PAN mengalami penurunan dibanding 1999, justru Amien Rais tampil menjadi capres alternatif. Dengan modal suara partai yang tidak besar, Amien menoleh ke Muhammadiyah untuk mendapat dukungan politik. Setelah melalui kompromi, maka secara eksplisit Muhammadiyah mendukung Amien Rais. Dukungan tersebut diungkapkan oleh Haedar Nasir, bahwa Amien Rais adalah kader terbaik Muhammadiyah meskipun dukungan ini nyatanya menabrak tradisi Muhammadiyah yang tidak ingin masuk dalam politik praktis.²⁶

Pemilu 2004 menggambarkan peta politik partai Islam yang tidak lagi satu suara dan cenderung memilih untuk berkoalisi dengan partai sekuler. Pilpres 2004 putaran pertama diikuti oleh lima pasang calon. Dari kalangan Islam ada Salahudin Wahid didukung oleh PKB, Hasyim Muzadi didukung oleh PDIP karena berpasangan dengan Megawati, Amien Rais mendapat dukungan dari PAN, PBR dan PKS, sedangkan Hamzah Haz mendapat dukungan dari PPP. Adapun PBB justru mendukung pasangan Susilo Bambang Yudoyono – Jusuf Kalla. Hasil pemilu putaran pertama tidak mampu menghasilkan suara mayoritas sehingga pemilihan presiden dilanjutkan dengan putaran kedua yang akhirnya mengukuhkan kemenangan pasangan Susilo Bambang Yudoyono – Jusuf Kalla.

Tabel 1. Peta Koalisi Partai Politik Pada Pilpres 2004

No Urut.	Putaran 1	Hasil (%)	Partai Pendukung	Putaran 2	Hasil (%)
1	Wiranto – Salahudin Wahid	22,19	Golkar, PKB		
2	Megawati – Hasyim Muzadi	26,24	PDIP, PDS	Megawati – Hasyim Muzadi	39,38
3	Amien Rais – Siswono Yudo Husodo	14,94	PAN, PBR, PKS, PNBK, PSI		
4	Susilo Bambang Yudoyono – Jusuf Kalla	33,58	Partai Demokrat, PBB, PKPI	Susilo Bambang Yudoyono – Jusuf Kalla	60,62
5	Hamzah Haz – Agum Gumelar	3,05	PPP		

Sumber: Saiful Mujani, William Liddle, Kuskrindo Ambardi, *Kuasa Rakyat*. (Jakarta: Mizan, 2011), hlm. 155.

Partai-partai Islam yang awalnya terfragmentasi saat pilpres putaran pertama,

²⁶ Saiful Mujani, *op.cit.*, hlm. 150.

justru mulai merapat di kedua kubu capres pada putaran kedua. PPP dan PKB merapat ke pasangan Megawati-Hasyim Muzadi, sedangkan PAN dan PKS merapat ke pasangan Susilo Bambang Yudoyono-Jusuf Kalla.

Pada pilpres 2009 partai Islam kembali berkoalisi mendukung Susilo Bambang Yudoyono yang kini berpasangan dengan Boediono. Hasilnya, Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II juga masih diwarnai dengan kabinet yang diisi oleh koalisi partai politik pendukung pemerintah. Koalisi turah (*oversized coalition*) yang terjadi dalam KIB jilid II tentu bukan tanpa alasan. Bagi partai pendukung pemerintah termasuk partai Islam, koalisi bertujuan untuk menjaga kelangsungan kolektif partai seperti yang diungkapkan oleh Katz dan Mair bahwa partai politik menjadi agen negara dan menggunakan sumber daya milik negara untuk memenuhi kepentingan kolektif partai.²⁷ Partai membangun koalisi demi memaksimalkan kekuasaan atau yang disebut Riker sebagai *office-seeking*.²⁸ Sedangkan bagi partai pemerintah dalam hal ini Partai Demokrat, *oversized coalition* menjadi kekuatan melawan oposisi di parlemen dalam hal pengambilan keputusan.

Tabel 2. Peta Koalisi Partai Islam Pada Pilpres 2009

No.	Pasangan	Hasil (%)	Partai pendukung
1	Megawati - Prabowo	26,79	PDIP, Gerindra
2	Susilo Bambang Yudoyono - Boediono	60,80	Demokrat, PPP, PKB, PKS, PAN
3	Jusuf Kalla - Wiranto	12,41	Golkar, Hanura

Sumber: Saiful Mujani, William Liddle, Kuskrido Ambardi, *Kuasa Rakyat*. (Jakarta: Mizan, 2011), hlm. 157-162.

Drama koalisi partai politik berlanjut pada Pemilu 2014 dimana sebelum Pemilu Legislatif digelar pada 9 April 2014, partai-partai Islam diprediksi banyak kalangan tidak akan bersinar bahkan disinyalir akan tenggelam oleh partai-partai sekuler. Hal ini antara lain didasarkan pada hasil jejak pendapat (*polling*) yang dilakukan sejumlah lembaga survei di Indonesia menjelang pemilu legislatif. Menurut Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2013, misalnya,

²⁷ Katz and Mair, *op.cit.*, hlm. 5.

²⁸ Lihat Kaare Strom, *op.cit.*, hlm. 567.

perolehan suara partai-partai Islam semuanya berada di bawah angka 5% di mana PKB memperoleh 4,5%, PPP 4%, PAN 4% dan PKS hanya 3,7%.²⁹ Namun ternyata perolehan suara hampir semua partai Islam pada Pemilu Legislatif 2014 mampu mematahkan prediksi tersebut.

Tabel 3. Prosentase Perolehan Suara Partai Islam (dalam persen)

Partai	Pemilu 1999	Pemilu 2004	Pemilu 2009	Pemilu 2014
PKB	12,61	10,61	4,95	9,04
PKS (mulanya bernama Partai Keadilan)	1,36	7,20	7,89	6,79
PAN	7,12	6,41	6,03	7,57
PPP	10,71	8,16	5,33	6,53
PBB	1,94	2,62	-	-
PBR	-	2,60	-	-

Sumber: Data KPU. www.kpu.go.id, diakses pada 31 Januari 2015

Berdasarkan hasil perolehan suara pada Pemilu Legislatif 2014, partai-partai Islam memperoleh suara yang cukup signifikan, bahkan PKB justru menunjukkan peningkatan suara jika dibandingkan pemilu 2009. Begitu juga dengan PKS yang meskipun didera badai korupsi di tubuh pimpinan partai, namun loyalitas pemilih tidak serta merta menggerus perolehan suara partai tersebut. Hal itulah yang kemudian memunculkan wacana untuk mempersatukan partai-partai Islam, bahkan upaya tersebut ditindaklanjuti dengan pertemuan antar elit partai Islam. Memori 1999 di mana koalisi partai-partai Islam melalui “Poros Tengah” berhasil mengalahkan partai nasionalis-sekuler seolah ingin diulang kembali.³⁰ Tetapi ternyata tidak semua partai Islam bersedia bergabung ke dalam poros tersebut. PKB yang notabene paling banyak mendapatkan suara pemilih justru yang paling kencang menolak rencana koalisi itu.

²⁹ Iding R. Hasan, “Islam dalam Pusaran Politik Pilpres 2014”, 9 Juni 2014, <http://www.csrc.or.id/berita-278-islam-dalam-pusaran-politik-pilpres-2014.html>, diakses pada tanggal 12 November 2014.

³⁰ Pasca Pemilu 1999, menjelang pemilihan presiden di MPR tahun 1999 muncul koalisi poros tengah yaitu koalisi partai-partai Islam yang berhasil meperjuangkan Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Namun, dalam perjalanannya yang menjatuhkan Gus Dur dari kursi Presiden adalah juga poros tengah. Lihat Mulya Nurbilkis, “Peneliti LIPI: Koalisi Partai Islam Sulit Menang Pilpres 2014”, 25 November 2013, <http://news.detik.com/read/2013/11/25/123242/2422548/10/peneliti-lipi-koalisi-partai-islam-sulit-menang-pilpres-2014?>, diakses pada tanggal 4 Februari 2015.

Hasil pemilu menggambarkan tiga kekuatan besar yaitu PDIP sebagai pemenang pemilu, kemudian disusul oleh Golkar dan Gerindra. Dari ketiga partai tersebut nama Joko Widodo, Aburizal Bakrie dan Prabowo Subianto diunggulkan sebagai calon presiden. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika partai-partai lainnya menjajaki koalisi dengan ketiga poros besar tersebut, tak terkecuali Partai Islam. PKB menjalin komunikasi dengan PDIP. PPP dan PAN menjajaki koalisi dengan Gerindra, sementara PKS lebih mendekat ke Partai Golkar.³¹ Kehadiran tiga poros koalisi ini didasarkan pada suara partai-partai yang memiliki kekuatan tiga besar pada pemilu legislatif 2014.

Sikap politik partai-partai Islam dalam menjalin koalisi dengan ketiga poros tersebut menimbulkan dua pandangan yang berbeda dalam masyarakat. Di satu sisi, masyarakat mengharapkan partai-partai Islam ini bisa bersatu dan tidak terpecah belah sehingga bisa membangun kekuatan tersendiri, namun disisi lain partai Islam memang sebaiknya melakukan koalisi dengan partai-partai nasionalis. Keniscayaan partai Islam membangun koalisi dengan partai nasionalis karena kenyataan saat itu menunjukkan tren pemilih merujuk pada dua kandidat besar yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Wacana pembentukan koalisi Poros Tengah jilid II kandas karena pada akhirnya hanya ada dua poros yang menjadi kontestan Pilpres 2014, yakni poros Gerindra dengan Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajassa sebagai capres-cawapres dan Poros PDIP dengan Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Polarisasi tersebut membuat partai-partai Islam akhirnya terbelah ke dalam dua koalisi yang akhirnya terbentuk. PAN, PPP, PKS dan PBB merapat ke poros Gerindra sedangkan PKB tetap ke PDIP. Bahkan ormas-ormas Islam atau tokoh-tokoh Islam yang seharusnya menjadi mediator justru terjebak dalam pusaran pertentangan. Para petingginya pun terpecah-pecah. Tokoh PBNU Said Aqil Siradj memperlihatkan dukungannya kepada Prabowo sedangkan Hasyim Muzadi mengisyaratkan dukungan kepada Jokowi.

Demikian pula dengan para ulama dan kyai yang berada di setiap pasangan capres.

Tabel 4. Peta Koalisi Partai Islam pada Pilpres 2014

No.	Pasangan	Hasil (%)	Partai Pendukung
1	Prabowo – Hatta	46,85	Gerindra, PPP, PKS, PAN, Golkar
2	Jokowi – JK	53,15	PDIP, PKB, Nasdem, Hanura

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Perilaku Koalisi Partai Politik

Fenomena koalisi terekam sangat jelas dalam praktik politik Indonesia, baik di tingkat nasional maupun dinamika politik lokal. Partai yang memiliki jarak ideologi sangat jauh seperti PDIP, PPP dan PKS di beberapa tempat dalam pemilihan kepala daerah justru menjalin koalisi. Contoh kasus ini terjadi dalam pilkada Kota Yogyakarta tahun 2006, dimana PDIP sebagai partai nasionalis-sekuler menjalin koalisi dengan PPP dan PKS yang menjadikan Islam sebagai ideologi partai. Pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2012, Golkar menjalin koalisi dengan PPP (partai Islam) dan Partai Damai Sejahtera (PDS) yang secara formal adalah partai umat Nasrani. Demikian juga di tingkat Nasional, misalnya PPP juga menjalin koalisi dengan PDIP dalam mengusung Megawati sebagai calon presiden pada Pilpres 2004 putaran kedua. Hal ini menengaskan bahwa internalisasi ideologi parpol sangat lemah dan koalisi dominan sebagai ikatan koalisi pragmatis ketimbang atas dasar kedekatan ideologi formal.³² Kondisi inilah yang disebut Riker sebagai koalisi *office-seeking*, yang berupaya untuk memaksimalkan kekuasaan tanpa memperhatikan ideologi.

Berkaca dari pengalaman 1999 dan 2014 dalam hal koalisi partai Islam di Indonesia maka koalisi harus dilakukan setidaknya karena dua sebab: *pertama*, Ada kedekatan ideologis yang sangat kuat untuk mempersatukan mereka dalam satu gugus politik. *kedua*, Ada persamaan kepentingan politik yang mesti diperjuangkan bersama-sama.³³ Akan tetapi, ternyata kedua alasan tersebut diaplikasikan secara berbeda pada Pemilu 1999 dan 2014. Pada pemilihan

³¹ Iding R. Hasan, *op.cit.*

³² Hanta Yuda, *op.cit.*, hlm.35.

³³ Deliar Noer, *op.cit.*, hlm.304.

Presiden 1999, koalisi Partai Islam terbentuk dengan alasan kedekatan ideologis, sama-sama partai berbasis Islam ataupun basis massa Islam dan memiliki kepentingan yang sama yaitu menhadang kekuatan Megawati dan Habibie. Ini berbeda ketika Pilpres 2014 dimana koalisi partai Islam tidaklah terbentuk karena masing-masing partai memiliki kepentingan politik yang berbeda dalam membangun koalisi.

Terkait dengan persoalan koalisi yang terjadi dari Pemilu 1999, 2004, 2009 dan 2014 maka sistem pemilihan presiden yang berbeda tentu juga berpengaruh pada peta koalisinya. Sistem pemilihan presiden tahun 1999 dilakukan melalui Sidang Istimewa MPR yang melibatkan sekitar 695 anggota, sehingga lebih memudahkan dalam proses pencalonan hingga pemungutan suaranya. Dinamika politik yang terjadi pun hanya berkisar di kalangan elit partai. Adapun Pilpres 2014 yang menyajikan pemilihan secara langsung oleh rakyat Indonesia tentu menjadi proses yang panjang. Selain harus melalui proses konvensi di internal partai dalam mengusung calon, juga perlu dilakukan koalisi antar partai politik jika suara tidak mencapai ambang batas untuk mengajukan calon sendiri. Oleh sebab itu, tawar-menawar politik menjadi suatu keniscayaan ketika koalisi antar partai politik terbentuk. Jabatan menteri di kabinet ataupun pimpinan di parlemen menjadi tujuan dari koalisi yang terbentuk. Kondisi inilah yang menjadikan pragmatisme politik sebagai salah satu faktor yang membuat sulitnya koalisi Partai Islam terbentuk pada Pilpres 2014 selain juga faktor ketokohan.

Faktor Pragmatisme Politik

Setiap partai politik dibentuk dengan mendasarkan diri pada ideologi yang hendak diusungnya dan ini kemudian menjadi identitas partai. Ideologi yang dianut oleh partai bersangkutan dapat digunakan untuk membedakan antara partai yang satu dengan yang lain. Selain itu, ideologi juga merupakan basis perjuangan atau cita-cita yang ingin dicapai satu partai politik.³⁴ Hal yang sama seperti diuraikan oleh De Swaan yang menekankan betapa pentingnya ideologi

³⁴ Lili Romli, "Masalah Kelembagaan Partai Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru", *Jurnal Penelitian Politik LIPI*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2008, (Jakarta: LIPI, 2008), hlm. 21-30.

partai dalam pembentukan koalisi. Akan tetapi, dalam konteks koalisi yang terbentuk pada Pilpres di Indonesia tahun 2004, 2009 dan 2014, pragmatisme politik-lah yang menjadi faktor terbentuknya koalisi.

Sejak reformasi bergulir, partai-partai di Indonesia telah membentuk sistem kepartaian yang mirip kartel.³⁵ Salah satu buktinya adalah hilangnya peran ideologi partai sebagai faktor penentu perilaku koalisi partai. Hal inilah yang terjadi dalam koalisi partai-partai politik di Indonesia baik dalam Pilkada maupun Pemilihan Presiden. Kenapa kartelisasi ini bisa terbentuk dijawab oleh Ambardi dan Katz dan Mair bahwa semua itu adalah kepentingan partai-partai untuk menjaga kelangsungan hidup partai. Kelangsungan hidup ini berkaitan dengan sumber keuangan terutama yang berasal dari pemerintah. Sumber keuangan yang dimaksud bukanlah uang pemerintah yang khusus/resmi dialokasikan untuk partai politik, melainkan uang pemerintah yang didapatkan partai melalui perburuan rente (*rent seeking*). Aktivitas ini dimungkinkan jika partai politik memiliki akses dalam jabatan pemerintahan dan parlemen. Lebih khusus lagi jabatan menteri maupun jabatan komisi di parlemen untuk memelihara sumber keuangan partai.³⁶

Koalisi partai politik era pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono jilid I dan II menjadi contoh bagaimana partai memanfaatkan posisi kementerian sebagai sumber pendanaan bagi partai. Beberapa menteri terjerat kasus korupsi di beberapa kementerian seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik yang juga salah satu petinggi Partai Demokrat sebagai tersangka atas kasus pemerasan terhadap kementerian ESDM dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) juga menjerat Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat, Andi Mallarangeng saat menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga dalam kasus

³⁵ Kartelisasi didefinisikan sebagai situasi dimana partai-partai politik secara kolektif mengabaikan komitmen ideologis atau programatis mereka demi kelangsungan hidup mereka sebagai satu kelompok. Lihat Kuskridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel*, (Jakarta: KPG, 2009), hlm. 253.

³⁶ Lihat Kuskridho Ambardi, *op.cit.*, hlm. 3 dan Richard S. Katz and Peter Mair, *op.cit.*

Hambalang. Suryadharma Ali yang merupakan Ketua Umum PPP juga terindikasi korupsi sewaktu menjabat sebagai Menteri Agama.

Berdasarkan kajian dari Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, menteri dari parpol memiliki beban untuk membantu keuangan parpol dan pendanaan tersebut biasanya digunakan untuk biaya operasional partai, terutama pada saat pemilihan umum karena pada saat itu, partai harus mengeluarkan anggaran besar untuk kampanye.³⁷

Seperti yang dikatakan oleh Katz dan Mair bahwa ketergantungan partai politik pada dana yang berasal dari pemerintah telah mengubah watak utama partai politik. Partai politik semakin menjauhi masyarakat dan semakin dekat dengan pemerintah. Karena semua partai bergantung pada sumber dana yang sama, perlahan mereka berkembang menjadi satu kelompok dengan kepentingan yang sama; bagaimana mendapat dan menjaga sumber keuangan mereka.³⁸ Gejala inilah yang mendera partai politik di Indonesia yang tentu membutuhkan dana besar bagi operasional partai serta kepentingan kampanye saat pemilu.

Terkait dengan kursi kabinet adalah hal yang menarik untuk dicermati pada Pilpres 2014. Salah satu calon Presiden 2014, Joko Widodo selalu mengatakan bahwa koalisi yang akan dibentuknya bukanlah koalisi transaksional yang berdasarkan tawar-menawar posisi menteri. Namun pada kenyataannya, ketika berbicara mengenai politik, kita akan selalu ingat dengan pernyataan Harold Laswell bahwa "Politik adalah tentang siapa mendapat apa dan bagaimana".³⁹ Ini terbukti dari pernyataan wakil presiden terpilih Jusuf Kalla yang mengatakan bahwa ada 16 kursi yang sudah "dijatah" untuk diisi oleh partai koalisi pendukung PDIP di Pilpres 2014. Ini menunjukkan bahwa politik transaksional tetap terjadi sebagai dampak dari koalisi.⁴⁰

³⁷ Dani Prabowo, "Belajar dari Kasus Korupsi pada Era SBY, Jokowi Diminta Tak Pilih Menteri dari Parpol", 4 September 2014, <http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/09/04/1442110/>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2015.

³⁸ Kuskrindo Ambardi, *op.cit.*, hlm. 287.

³⁹ Harold Laswell dalam Miriam Budiardjo, *op.cit.*, hlm. 22.

⁴⁰ Ihsanudin, "JK Sudah Sediakan Posisi Menteri untuk Partai

PKB sebagai salah satu partai Islam yang sedari awal teguh untuk berkoalisi dengan PDIP juga memiliki kepentingan memperebutkan kursi kabinet. Sekretaris Dewan Syuro PKB, Andi M. Ramli menyatakan secara terbuka bahwa PKB mengharapkan tiga kursi menteri. Bahkan PKB sudah menyiapkan nama-nama calonnya yaitu Muhaimin Iskandar, Rusdi Kirana dan Imam Nachrowi. Politisi Ali Maschan Moesa juga menegaskan bahwa sudah ada pembicaraan antara Muhaimin Iskandar dan Megawati perihal kursi Menteri Agama. Bagi PKB, posisi menteri agama sudah pas jika diserahkan pada partainya.⁴¹ Akan tetapi, harapan memasukan Muhaimin Iskandar dan Rusdi Kirana dalam bursa calon menteri gagal karena Jokowi dengan tegas menyatakan bahwa jika ingin menjadi menteri maka harus melepaskan jabatan struktural di partai.

Dukungan Partai Islam seperti PKS, PPP dan PAN kepada kubu capres Prabowo atau yang dikenal dengan sebutan Koalisi Merah Putih juga bukan tanpa alasan. Selain figur Prabowo yang cukup kuat, dukungan PKS ke Gerindra menurut Ketua DPP Partai Gerindra, Desmon Mahesa bahwa ideologi PKS tidak sejalan dengan PDIP dan lebih sejalan dengan Gerindra. Selain itu, menurut Desmon,

"Kekuatan Koalisi Merah Putih selama ini disokong Golkar dan PAN yang awalnya akan bergabung ke kubu Jokowi-JK, tetapi kemudian mengalihkan dukungan. Artinya, Koalisi Merah Putih sebenarnya hanya pilihan karena ditolak Jokowi-JK. Koalisi Merah Putih hanya dijadikan kendaraan oleh partai-partai tersebut untuk meningkatkan daya tawar mereka sehingga kembali dilirik Jokowi-JK."⁴²

Terkait dukungannya terhadap Partai Gerindra, PKS juga telah mengajukan draf

Koalisi Merah Putih yang Ingin Bergabung", 15 September 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/09/15/23151331/JK.Sudah.Sediakan.Posisi.Menteri.untuk.Partai.Koalisi.Merah.Putih.yang.Ingin.Bergabung>, diakses pada tanggal 11 Februari 2015.

⁴¹ Intriknews, "PKB Ingatkan Janji Ibu Mega Tentang Jatah Menteri Agama", Agustus 2014, <http://www.intriknews.com/2014/08/pkb-ingatkan-janji-ibu-mega-tentang.html>, diakses pada tanggal 12 Februari 2015.

⁴² Redaksi, "Koalisi Merah Putih Hanya Akan Tersisa Gerindra dan PKS", <https://www.selasar.com/politik/koalisi-merah-putih-hanya-akan-tersisa-gerindra-dan-pks>, diakses pada tanggal 8 Februari 2015.

proposal dan program ke Partai Gerindra untuk mewujudkan kesepakatan koalisi. Sekjen PKS, Taufik Ridho mengungkapkan bahwa pembagian kekuasaan dalam sebuah koalisi adalah suatu keniscayaan, termasuk siapa yang akan dicalonkan menjadi capres, cawapres dan menteri. Menurut Taufik, urusan kabinet itu adalah bagian dari tanggung jawab bersama dalam sebuah koalisi dan pembagian kekuasaan itu adalah konsekuensi dalam sebuah koalisi.⁴³ Karena koalisi adalah sebuah keniscayaan dalam negara dengan sistem multipartai maka koalisi yang terbentuk tidaklah gratis, tawar-menawar politik untuk menduduki jabatan publik adalah hal yang tidak bisa dihindari.

Teori *Minimum Winning Coalition* menyatakan bahwa peserta koalisi akan membentuk koalisi seminimal mungkin asal menjamin kemenangan dalam persaingan dan tidak akan menambah peserta lagi, sehingga keuntungan politik yang didapat akan didistribusikan secara maksimal kepada peserta koalisi. Singkatnya, partai koalisi fokus pada upaya perolehan suara minimal (50%+1) untuk menang, dan ketika ambang batas sudah tercapai maka koalisi akan berhenti mencari mitra koalisi.

Teori koalisi Riker ini bisa digunakan untuk melihat kecenderungan logika matematis mengapa partai Islam sulit berkoalisi. Berdasarkan hasil Pemilu 2014, partai Islam memiliki jumlah suara akumulatif mencapai lebih dari 29% (jika ditambah PBB maka mencapai 31%) dan ini memungkinkan bagi koalisi partai Islam untuk mengajukan calon Presiden dan wakil Presiden sendiri. Namun, jika melihat jumlah kursi di DPR RI 2014, partai Islam (dalam konteks ini PPP, PAN, PKB dan PKS) hanya memiliki 175 kursi. Jumlah yang sangat kecil jika harus berhadapan dengan partai-partai lainnya dalam pengambilan kebijakan di parlemen.

Menurut Yunarto Wijaya, Direktur Charta Politika, koalisi pemilihan presiden tak akan banyak mempertimbangkan kesamaan platform antarpartai. Koalisi hanya dipengaruhi oleh dua faktor utama: daya pikat calon presiden sebagai

pemimpin koalisi dan kursi dalam kabinet untuk partai peserta koalisi.⁴⁴ Selain itu, siapapun tokoh yang diajukan oleh koalisi ini sepertinya akan sulit untuk mengalahkan dua kandidat kuat yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Alasan inilah yang mungkin menjadi pertimbangan partai Islam untuk tidak berkoalisi seperti pada Pemilu 1999 dan lebih memilih untuk menjalin koalisi dengan partai nasionalis. Karena bagaimana pun, koalisi yang terbentuk bukan hanya koalisi pemerintahan yang kuat namun juga perlu memperhitungkan koalisi parlemen yang memadai meskipun dalam kenyataannya, di Indonesia koalisi yang terbentuk bukanlah koalisi minimal nya Riker namun justru yang terjadi adalah *Oversized Coalition*. Faktor kepentingan atau pragmatisme partai dalam mencari jabatan-jabatan politik (*office-seeking*) adalah lebih penting dilakukan demi menjaga kelangsungan hidup partai.

Faktor Figur/Ketokohan

Pemilu merupakan agenda politik parpol dalam upaya menempatkan caleg-caleg nya di kursi parlemen. Perolehan suara pemilu juga berdampak pada kemungkinan parpol dalam mengajukan calon Presiden dan wakil Presiden. Ketokohan seseorang menjadi faktor yang harus diperhatikan karena ini berkaitan dengan hitung-hitungan probabilitas kemenangan calon yang diajukan parpol. Hasil Pemilu Legislatif 2014 memunculkan konfigurasi politik yang cukup berbeda dari dua pemilu sebelumnya dimana PDI-Perjuangan memperoleh suara terbesar dan yang cukup menjadi perhatiannya sebenarnya adalah suara akumulatif partai Islam yang mencapai hampir 30%. Jika partai-partai Islam tersebut berkoalisi maka dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden sendiri.

Meskipun pasca-Pemilu Legislatif muncul wacana koalisi namun kenyataan berbicara lain. Masing-masing parpol Islam memilih jalur komunikasi politik dengan partai nasionalis. Berbagai opini pun bermunculan di masyarakat yang menganggap bahwa sikap politik partai

⁴³ Muhammad Sholeh, "Merapat ke Gerindra, PKS Sebut Harus Ada Bagi-Bagi Kursi Menteri", 8 Mei 2014, <http://www.merdeka.com/politik/merapat-ke-gerindraps-sebut-harus-ada-bagi-bagi-kursi-menteri.html>, diakses pada tanggal 8 Februari 2015.

⁴⁴ Lihat Khairul Anam, "Mengapa PDIP Lebih Condong ke NasDem dan PKB?", 12 April 2014, <http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/04/12/269570036/Mengapa-PDIP-Lebih-Condong-ke-NasDem-dan-PKB>, diakses pada tanggal 12 Februari 2015.

Islam yang urung berkoalisi disebabkan tidak adanya figur partai/tokoh yang memiliki elektabilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan dua kandidat kuat seperti Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Berdasarkan survey nasional dari Lembaga Survey Nasional (LSN) pada Oktober 2013 di 34 Provinsi di Indonesia dengan melibatkan 1.240 responden dan melibatkan 5 surat kabar nasional serta 5 media online nasional, menanyakan secara terbuka siapa tokoh Islam yang berpotensi mempersatukan partai Islam pada Pilpres 2014 maka hasilnya yaitu Mahfud MD mendapat 16,4%, Rhoma Irama mendapat 9,6% dan Suryadharma Ali 9,1%. Survey LSN juga menyebutkan bahwa Mahfud MD difavoritkan sebagai calon yang diusung oleh PKB dengan nilai 31,4% mengalahkan dukungan terhadap Jusuf Kalla 20,7% dan Rhoma Irama yang mendapat dukungan 12,7%, bahkan Muhaimin Iskandar yang merupakan Ketua Umum PKB hanya mendapat dukungan suara 9,6% saja.⁴⁵ Berdasarkan kalkulasi politik tersebut, Mahfud MD meskipun berpotensi sebagai pemersatu partai Islam namun belum mampu menyaingi popularitas Jokowi dan Prabowo. Berikut hasil survei beberapa lembaga terkait elektabilitas calon presiden yang dilakukan pada tahun 2013 dan 2014.

Tabel 5. Hasil Survey Calon Presiden 2014⁴⁶

No.	Nama Calon	Survey CSIS (9-16 April 2013)	Survey SMRC (19-29 Desember 2013)	Survey Indikator (Mei 2014)
1	Joko Widodo	28,6%	20%	31,8%
2	Prabowo Subianto	15,6%	8%	9,8%
3	Aburizal Bakrie	7%	5%	7%
4	Megawati	5,4%	3%	-
5	Jusuf Kalla	3,7%	2,1%	2%
6	Mahfud MD	2,4%	-	0,6%

Sumber: indicator.co.id, article.wn.com, kompas.com, diakses pada tanggal 11 Februari 2015.

Menjelang Pilpres, Majelis Ulama Indonesia dan Forum Ukhuwah Islamiyah dalam pertemuannya mendesak partai politik peserta Pemilu 2014 yang berbasis massa Islam,

⁴⁵ Fabriana Firdaus, “Survey: Tokoh Islam Tak Mampu Saingi Jokowi”, 24 November 2013, www.tempo.co/read/news/2013/11/24, diakses pada tanggal 11 Februari 2015.

⁴⁶ CSIS adalah *Centre for Strategic and International Studies*. SMRC adalah *Saiful Mujani Research and Consulting*.

berkoalisi pada pemilihan Presiden namun ternyata koalisi tersebut tidak terjadi. Hal ini disebabkan hitung-hitungan politis dimana kecil kemungkinan munculnya koalisi dari partai-partai berbasis massa Islam karena tidak adanya faktor figur pemersatu dan tidak solidnya partai-partai Islam.

Menurut Syamsuddin Haris, Peneliti senior di Pusat Penelitian Politik LIPI, hambatan utama koalisi parpol Islam dalam Pemilu 2014 adalah tidak punya tokoh. Hal yang sama diungkapkan oleh Dosen Ilmu Pemerintahan UGM, Ari Dwipayana, “Mengenai modal suara, jumlah modal suara yang bisa dikumpulkan memang mencukupi untuk membentuk poros koalisi. Tapi mereka kesulitan untuk menemukan figur pemersatu. Yang kedua, secara historis mereka mempunyai hubungan tidak harmonis antara satu partai dengan partai yang lain sehingga poros koalisi baru yang dibangun berdasarkan sentimen Islam ini sulit diwujudkan.”⁴⁷

Sikap politik PKB yang sedari awal kukuh pada dukungannya terhadap PDIP menjadi modal yang cukup besar dalam menambah posisi tawar Jokowi yang memang dicalonkan oleh PDIP sebagai Capres. PPP, PAN, PKS akhirnya melabuhkan pilihan koalisi dengan Gerindra yang juga semakin menguatkan posisi Prabowo. Pengamat Politik UI, Arbi Sanit mengatakan bahwa partai-partai Islam sudah semestinya berkoalisi dengan partai nasionalis apabila ingin berperan di dalam politik kekuasaan. Hal ini dikarenakan partai-partai Islam sejauh ini tidak memiliki figur kuat yang mampu bersaing dengan calon presiden PDI Perjuangan Jokowi dan capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Kelemahan lainnya adalah sangat sulit menyatukan semua partai politik yang terdiri dari “sub ideologi yang berbeda-beda.”⁴⁸

Menurut Burhanudin Muhtadi, Direktur Indikator Politik Indonesia, elektabilitas capres

⁴⁷ Redaksi, “MUI dan FUI Desak Partai Islam Berkoalisi untuk Munculkan Figur Capres Islam”, 21 April 2015, <http://www.voaindonesia.com/content/mui-dan-fui-desak-partai-islam-berkoalisi-untuk-munculkan-figur-capres-islam/1897579.html>?, diakses pada tanggal 12 Mei 2014.

⁴⁸ BBC, “Partai Gerindra berkoalisi dengan PPP”, 18 April 2014, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/04/140418_koalisi_partai_islam, diakses pada 12 November 2014.

adalah instrumen utama bagi *office-seeking party* untuk meraih kekuasaan. Dukungan Nas Dem dan PKB yaitu politik tanpa syarat ke Jokowi bisa dibaca dalam konteks peluang keterpilihan Jokowi yang tinggi untuk menenangkan pilpres sehingga lebih membuka peluang bagi partai pendukung untuk terlibat dalam pemerintahan. Adapun PDI Perjuangan tidak mampu mengajukan capres sendiri tanpa berkoalisi dengan partai lain. Dilain pihak, dukungan PPP, PAN dan PKS kepada Prabowo sebagai capres juga dapat dibaca dalam konteks hanya Prabowo yang secara elektoral bisa mengalahkan Jokowi pada pilpres. Dukungan partai-partai kepada Jokowi dan Prabowo menjadi alat barter politik yang tegas untuk mendefinisikan siapa yang bakal “berada di dalam” (*the ins*) dan “yang di luar” (*the outs*).⁴⁹

Kondisi perpecahan yang disebabkan perbedaan dukungan terhadap poros capres merupakan hal yang wajar di negara demokrasi. Akan tetapi, harapan masyarakat untuk bisa menyatukan partai-partai berbasis Islam supaya tidak terpecah juga hal yang baik untuk dipertimbangkan.

Penutup

Koalisi merupakan suatu keniscayaan bagi negara dengan sistem multipartai seperti di Indonesia. Hal tersebut harus dilakukan karena berdasarkan hasil pemilu menunjukkan kecenderungan partai tidak mampu memenuhi suara mayoritas sehingga membutuhkan koalisi antar parpol dalam membangun pemerintahan. Pengalaman pemilu presiden 1999 dan 2014 memberikan gambaran perbedaan koalisi yang terbentuk antara partai Islam dan partai nasionalis. Pemilu 1999 berhasil membangun koalisi partai Islam dikarenakan ada kesamaan ideologi dan tujuan yang sama antar partai Islam tersebut. Namun, Pemilu 2014 menunjukkan kenyataan yang berbeda dimana koalisi Partai Islam tidaklah terbangun. Ideologi yang seharusnya menjadi salah satu alasan terbentuknya koalisi tampaknya dikalahkan oleh kepentingan politik praktis. Sistem pemilihan presiden yang berbeda juga

menjadi salah satu alasan bisa tidaknya koalisi Partai Islam terbangun baik pada pilpres.

Terkait dengan persoalan koalisi yang terjadi dari Pemilu 1999, 2004, 2009 dan 2014 maka sistem pemilihan presiden yang berbeda tentu juga berpengaruh pada peta koalisinya. Sistem pemilihan presiden tahun 1999 dilakukan melalui Sidang Istimewa MPR yang melibatkan sekitar 695 anggota, sehingga lebih memudahkan dalam proses pencalonan hingga pemungutan suaranya. Dinamika politik yang terjadi hanya berkisar di kalangan elit partai. Adapun Pilpres 2014 yang menyajikan pemilihan secara langsung oleh rakyat Indonesia tentu menjadi proses yang panjang. Selain harus melalui proses konvensi di internal partai dalam mengusung calon, juga perlu dilakukan koalisi antar partai politik jika suara tidak mencapai ambang batas untuk mengajukan calon sendiri. Oleh sebab itu, tawar-menawar politik menjadi suatu keniscayaan ketika koalisi antar partai politik terbentuk.

Selain sistem pemilihan presiden, ada faktor lain yang lebih memungkinkan sulitnya koalisi partai Islam terbentuk yaitu pragmatisme politik. Kepentingan pragmatis partai dapat dilihat pada saat memperebutkan jabatan di kabinet maupun pimpinan di parlemen. Posisi tersebut sangat strategis bagi partai dalam memanfaatkan sumber dana negara demi membantu kelangsungan hidup partai. Faktor lainnya yang cukup berpengaruh dalam kegagalan koalisi partai Islam pada Pilpres 2014 adalah tidak adanya figur pemersatu suara Islam yang mampu mengalahkan dua kandidat yang memiliki elektabilitas kuat yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Daftar Pustaka

Buku

- Ambardi, Kuskridho. 2009. *Mengungkap Politik Kartel*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Effendy, Bahtiar. 1998. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Paramadina.

⁴⁹ Burhanudin Muhtadi, “Teater Koalisi”, 26 Mei 2014, <http://www.indikator.co.id/publikasi/opini/10/Teater-Koalisi#sthash.EZTZGiqX.dpuf>, diakses pada tanggal 11 Mei 2015.

- Fattah, Eep Saefullah. 2000. *Zaman Kesempatan: Agenda Besar Demokratisasi Pasca Orde Baru*. Bandung: Mizan.
- Mujani, Saiful, William Liddle, dan Kuskridho Ambardhi. 2011. *Kuasa Rakyat: Analisis Tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia pasca Orde Baru*. Jakarta: Mizan.
- Noer, Deliar *et.al.* 1999. *Mengapa Partai Islam Kalah? Perjalanan Politik Islam dari Pra-Pemilu 1999 sampai Pemilihan Presiden*. Jakarta: ALVABET.
- Reeve, David. 2013. *Golkar Sejarah Yang Hilang: Akar Pemikiran dan Dinamika*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Sartori, Giovanni. 2005. *Parties and Party Systems: a Framework for Analysis*. UK: ECPR Press.
- Sirozi, Muhammad. 2004. *Catatan Kritis Politik Islam Era Reformasi*. Yogyakarta: AK Group.
- Tanthowi, Pramono U. 2005. *Kebangkitan Politik Kaum Santri: Islam dan Demokratisasi di Indonesia, 1990-2000*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban.
- Yuda, Hanta. 2010. *Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal

- Katz, Richard S. and Peter Mair. 1995. "Changing Models Of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party". London: Sage Publication. Vol.1. No.1.
- Romli, Lili. 2008. "Masalah Kelembagaan Partai Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru". *Jurnal Penelitian Politik LIPI* 5(1).
- Strom, Kaare. 1990. "A Behavioral Theory of Competitive Political Parties". *American Journal of Political Science*. Vol. 34.
- "Quo Vadis Politik Indonesia". 2004. Pusat Penelitian Politik Year Book 2004. Jakarta: LIPI Press.

Laporan dan Makalah

- Noor, Firman. 2012. *Institutionalising Islamic Political Parties in Indonesia: A Study of Internal Fragmentation and Cohesion in the Post-Soeharto Era (1998-2008)*. Dissertation. UK: University of Exeter.
- Wardani, Sri Budi Eko. 2007. *Koalisi Parpol dalam Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung Kasus Pilkada Provinsi Banten tahun 2006*. Jakarta: Tesis UI.

Surat Kabar dan Website

- Azed, Abdul Bari. 2014. "Pilpres di Era Transisi Tahun 1999". <http://www.jambiexpresnews.com/berita-18609-pilpres-di-era-transisi-tahun-1999.html>.
- Hasan. Iding R. 2014. "Islam dalam Pusaran Politik Pilpres 2014". <http://www.csrc.or.id/berita-278-islam-dalam-pusaran-politik-pilpres-2014.html>.
- Nurbilkis, Mulya. 2013. "Peneliti LIPI: Koalisi Partai Islam Sulit Menang Pilpres 2014". <http://news.detik.com/read/2013/11/25/123242/2422548/10/peneliti-lipi-koalisi-partai-islam-sulit-menang-pilpres-2014?>
- Prabowo, Dani. 2014. "Belajar dari Kasus Korupsi pada Era SBY, Jokowi Diminta Tak Pilih Menteri dari Parpol". <http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/09/04/1442110/>.
- Ihsanudin. 2015. "JK Sudah Sediakan Posisi Menteri untuk Partai Koalisi Merah Putih yang Ingin Bergabung". <http://nasional.kompas.com/read/2014/09/15/23151331/JK.Sudah.Sediakan.Posisi.Menteri.untuk.Partai.Koalisi.Merah.Putih.yang.Ingin.Bergabung>.
- Intriknews. 2014. "PKB Ingatkan Janji Ibu Mega Tentang Jatah Menteri Agama". <http://www.intriknews.com/2014/08/pkb-ingatkan-janji-ibu-mega-tentang.html>.
- Selasar.com. (n.d) "Koalisi Merah Putih Hanya Akan Tersisa Gerindra dan PKS". <https://www.selasar.com/politik/koalisi-merah-putih-hanya-akan-tersisa-gerindra-dan-pks>.
- Sholeh, Muhammad. 2014. "Merapat ke Gerindra, PKS Sebut Harus Ada Bagi-Bagi Kursi Menteri". <http://www.merdeka.com/politik/merapat-ke-gerindraps-sebut-harus-ada-bagi-bagi-kursi-menteri.html>.
- Anam, Khairul. 2014. "Mengapa PDIP Lebih Condong ke NasDem dan PKB?" <http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/04/12/269570036/Mengapa-PDIP-Lebih-Condong-ke-NasDem-dan-PKB>.
- Firdaus, Fabriana. 2013. "Survey: Tokoh Islam Tak Mampu Saingi Jokowi" dalam www.tempo.co/read/news/2013/11/24.
- VoaIndonesia. 2015. "MUI dan FUI Desak Partai Islam Berkoalisi untuk Munculkan Figur Capres Islam" <http://www.voaindonesia.com/content/mui-dan-fui-desak-partai-islam-berkoalisi-untuk-munculkan-figur-capres-islam/1897579.html?>

BBC.com. 2014. "Partai Gerindra berkoalisi dengan PPP" . http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/04/140418_koalisi_partai_islam.

Muhtadi, Burhanudin. 2014. "Teater Koalisi". <http://www.indikator.co.id/publikasi/opini/10/Teater-Koalisi#sthash.EZTZGiqX.dpuf>.

www.indikator.co.id, article.wn.com.

www.kpu.go.id.